

ANALISIS KAJIAN POTENSI DAN PENGGALIAN LABA BERSIH BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SLEMAN, TAHUN 2002

*Rudy Badrudin *)*

ABSTRACT

The autonomy of region be regulated in UU Nomor 22 Tahun 1999 (Pemerintahan Daerah) and UU Nomor 25 (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah). These regulations can be implicated to all of regions, for example Kabupaten Sleman if all of regions and Kabupaten Sleman have revenue to budget development. One of revenue to budget development region is Pendapatan Asli Daerah (PAD) from profit's Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). For developing BUMD, each region has to make a fit development strategy based on its endowment. This paper present the strategy of BUMD (Bank Pembangunan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar", and PDAM Kabupaten Sleman) in Kabupaten Sleman so that can give to contribute for profit's BUMD, PAD, and budget development.

PENDAHULUAN

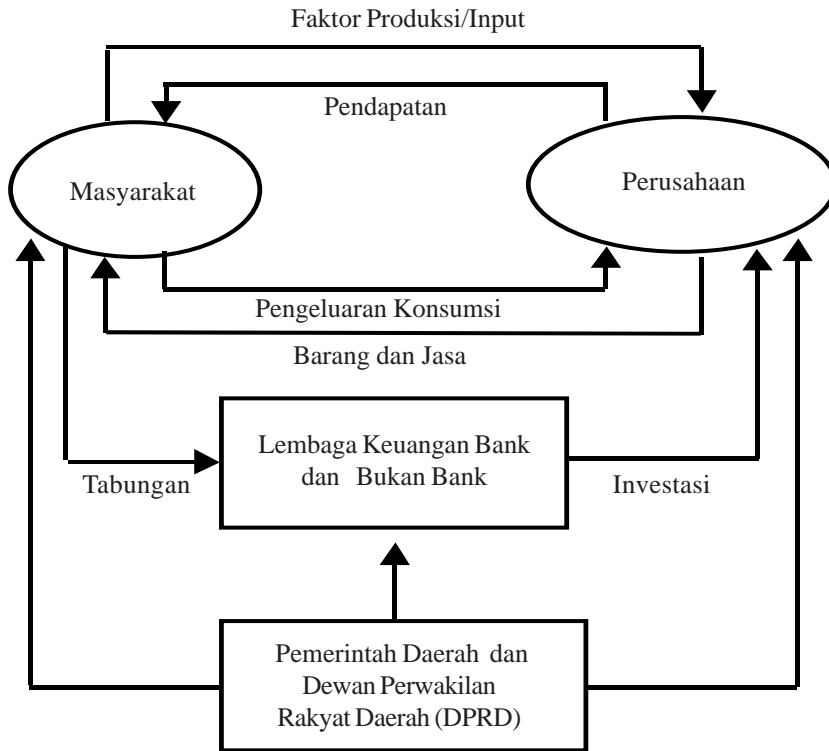
Lebih dari 3 tahun sudah kita menjalankan paradigma pembangunan yang telah memberikan peran yang lebih

besar kepada pemerintah, instansi, dan para pelaku ekonomi daerah dalam menangani pembangunan di daerah. Hal itu ditunjukkan dengan pemberlakuan dua undang-undang tentang Otonomi Daerah per 1 Januari 2001, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan daerah dalam menjalankan kedua undang-undang tersebut adalah kesiapan pelaku ekonomi daerah dan masalah sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Pelaku ekonomi di daerah sebagai komponen sumberdaya manusia di daerah dalam menyongsong Otonomi Daerah dapat dijelaskan secara teori dengan menggunakan *circular flow* diagram seperti yang ditunjukkan pada Diagram 1. Diagram tersebut menjelaskan bagaimana pelaku ekonomi berinteraksi, dengan asumsi bahwa ada lima pelaku yaitu masyarakat, perusahaan, lembaga keuangan bank dan bukan bank, pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

*) Drs. Rudy Badrudin, M.Si., adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.

Gambar 1
Circular Flow Diagram



Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) akan menjadi fasilitator bagi para pelaku ekonomi yang lain seperti masyarakat, perusahaan, dan lembaga keuangan dalam penentuan kebijakan untuk membuat peraturan-peraturan bagi kepentingan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dituntut untuk siap menghadapi Otonomi Daerah tersebut. Pemerintah daerah akan lebih leluasa mengelola badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) setelah Otonomi Daerah diberlakukan. Hal itu dapat dilakukan dengan persyaratan usaha dan strategi tertentu mengingat kondisi BUMD yang ada sekarang ini masih memprihatinkan (Bisnis Indonesia, 22 Desember 1999). DPRD juga dituntut untuk menjadi “oposisi” yang konstruktif bagi eksekutif pada saat Otonomi Daerah diberlakukan sehingga pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran yang seimbang (Kompas, 16 Desember 1999).

Menurut UU Nomor 25 tahun 1999, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumberdaya alam, dana alokasi umum, dan alokasi khusus. Dana perimbangan sebagai salah satu sumber pembiayaan

daerah tidak dapat diperoleh daerah secara maksimal karena ada sebagian yang menjadi haknya pemerintah pusat. Pinjaman daerah pun belum bisa diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah langsung karena pelaksanaan pinjaman daerah dilakukan melalui pemerintah pusat sebagaimana janji pemerintah dalam *Letter of Intent* (LoI) keempat yang ditandatangani di Jakarta, 13 Desember 2001 yang lalu (Kompas, 15 Desember 2001, hal. 13).

Oleh karena itu, tepatlah kalau pemerintah daerah harus pandai menggali sumber dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Tetapi bukan dengan sembarang membuat berbagai peraturan-peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah atau retribusi daerah yang ujung-ujungnya akan memberatkan pelaku ekonomi di daerah tersebut sehingga akan menjadi bumerang bagi pelaksanaan dan kelancaran otonomi daerah tersebut. Hal itu bahkan sudah ditegaskan dalam LoI IV, bahwa IMF meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut perda-perda (68 perda) yang bermasalah (Kompas, 26 Nopember 2001, hal. 15). Sumber dana daerah alternatif dapat pula digali oleh pemerintah daerah melalui pembentukan BUMD seperti yang sudah dijelaskan dalam Gambar 1. Dengan pembentukan BUMD yang kemudian dikelola secara profesional maka BUMD akan memperoleh keuntungan sehingga akan menjadi salah satu sumber penerimaan PAD.

Kabupaten Sleman yang terletak di Propinsi DIY perlu mengembangkan lebih lanjut sumber dana mandiri

yang berasal dari PAD Kabupaten Sleman, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pengembangan PAD Kabupaten Sleman sangat dibutuhkan bagi Kabupaten Sleman itu sendiri dalam rangka membiayai pembangunan di Kabupaten Sleman secara lebih mandiri. Pembiayaan secara lebih mandiri tersebut diperlukan karena sangat berisiko sekali bagi Kabupaten Sleman apabila mengharapkan sumber pembiayaan yang bukan bersumber pada PAD karena dana perimbangan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumberdaya alam, dana alokasi umum, dan alokasi khusus tidak dapat diperoleh daerah secara maksimal karena ada sebagian yang menjadi haknya pemerintah pusat. Pinjaman daerah pun belum bisa diharapkan menjadi salah satu sumber langsung pembiayaan daerah karena pelaksanaan pinjaman daerah tetap melalui pemerintah pusat, dalam arti pemerintah pusat sebagai peminjam yang kemudian akan dialokasikan kepada pemerintah daerah.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah urusan yang harus dikelola Kabupaten Sleman sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, beban pembiayaan semakin berat. Perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama 8 tahun ditunjukkan sebagai berikut:

Peningkatan realisasi APBD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun juga diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai gambaran,

kondisi PAD selama 8 tahun terakhir ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2
Realisasi PAD Sleman 1995/1996 - 2002

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Peningkatan
1995/1996	Rp 7.442.337.458	-
1996/1997	Rp 10.574.223.660	42 %
1997/1998	Rp 13.646.881.289	29 %
1998/1999	Rp 14.786.415.038	8 %
1999/2000	Rp 17.125.444.712	13,55%
2000	Rp 17.889.883.435	4,46%
2001	Rp 29.571.153.214	65,30%
2002	Rp 38.908.192.767	31,57%

Sumber: BPKKD.

Berdasarkan realisasi PAD yang tergalai tersebut, dapat ditunjukkan kontribusi PAD terhadap realisasi APBD dan APBD non rutin sebagai berikut:

Tabel 3
Kontribusi PAD Sleman 1995/1996 - 1999/2000

Tahun Anggaran	Kontribusi Pada APBD	Kontribusi Pada APBD Non Belanja
1995/1996	22,69 %	27,32 %
1996/1997	14,68 %	33,19 %
1997/1998	14,92 %	35,79 %
1998/1999	14,91 %	35,48 %
1999/2000	11,86 %	32,34 %

Sumber: Selintas Hasil Pembangunan Kabupaten Sleman, 2000, hal. 32.

Sumber PAD yang menjadi adalah dari sektor pajak adalah pajak hotel dan restoran, Pajak penerangan jalan dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sementara untuk retribusi daerah yang menjadi andalan adalah retribusi pelayanan kesehatan,

retribusi pasar dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Secara lengkap, komponen PAD Kabupaten Sleman tahun anggaran 2002 ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Komponen PAD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002

NU	SUBYEK	JUMLAH	PERSENTASE DARI			
			TOTAL	SUBTTL	SUBSUB	SSS
1	Pendapatan Asli Daerah	34.001.261.932	10.37%			
	a. Pajak Daerah	17.074.636.139		50.22%		
	- Pajak Hotel dan Restoran	9.000.000.000			52.71%	
	- Pajak Hiburan	526.700.000			3.08%	
	- Pajak Reklame	622.554.339			3.65%	
	- Pajak Penerangan Jalan	5.545.381.800			32.48%	
	- Pjk BGG-C	180.000.000			1.05%	
	- Pjk ABT dan Pompa Air	1.200.000.000			7.03%	
	b. Retribusi Daerah	9.443.952.700		27.78%		
	- R. Pelayanan Kesehatan	4.761.960.000			50.42%	
	- R. Pel. Sampah dan Kebers.	231.900.000			2.46%	
	- R. Cetak KTP dan Akte Capil	610.145.500			6.46%	
	- R. Parkir di Tepi Jalan	420.000.000			4.45%	
	- R. Pasar	1.150.000.000			12.18%	
	- R. Pengujian Kend. Bermotor	316.717.500			3.35%	
	- R. Pemakaian Kekay. Daerah	57.125.000			0.60%	
	- R. Terminal	164.466.000			1.74%	
	- R. Rumah Pemot. Hewan	62.748.200			0.66%	
	- R. Tempat Rekr. dan OR	660.600.000			6.99%	
	- R. Penjualan PUD	233.290.500			2.47%	
	BPP/Kebun	58,652,500				25.14%
	Kebun Sawangan	600,000				0.26%
	Benih Ikan	24,038,000				10.30%
	Pentas seni	150,000,000				64.30%
	- R. Izin Penggunaan Tanah	90.000.000			0.95%	
	- R. IMB	500.000.000			5.29%	
	- R. Izin Gangguan	180.000.000			1.91%	
	- R. Izin Trayek	5.000.000			0.05%	
	c. Bagian Laba Perush. Daerah	1.761.360.635		5.18%		
	- BPD	1.018.116.635			57.80%	
	- Perush. Daerah	743.244.000			42.20%	
	BPR Bank Pasar	743,000,000				99.97%
	PDAM	244,000				0.03%
	- Hasil Investasi kpd phk III	nihil				
	d. Lain-lain PAD	5.721.312.458		16.83%		
	- Hsl Penj. Milik Daerah	30.000.000			0.52%	
	Drum Bekas aspal	30,000,000				100.00%

	- Jasa Giro	591.128.858			10.33%	
	BPD	591,128,858				100.00%
	- Sumbangan Pihak Ketiga	2.500.000			0.04%	
	- Pener. Kembali Restr. Modal	1.392.688.000			24.34%	
	Restrukt. Model Perikanan	735,188,000				52.79%
	Restrukt. Model Perkebunan	196,250,000				14.09%
	Restrukt. Modal Kehutanan	75,000,000				5.39%
	Restrukt. T. Pangan dan Hort.	298,750,000				21.45%
	Restrukt. Modal Koperasi	87,500,000				6.28%
	- Lain-lain Pendapatan	3.704.995.600		10.90%	64.76%	
	Penj. Sapi dana kereman	2,582,661,200				69.71%
	Penelitian IMB	19,250,000				0.52%
	Adm. Pemutihan IMB	2,000,000				0.05%
	Sewa Lahan eks Dipenda	nihil				
	Penerimaan MCK Terminal	8,664,000				0.23%
	Jasa fasilitas. Kaliurang	31,170,400				0.84%
	Jasa fasilitas. Kaliadem	nihil				
	Sewa Kios Kaliurang	nihil				
	Konsesi Pemasangan Iklan	321,250,000				8.67%
	Tanda Daftar Perusahaan	29,000,000				0.78%
	Bunga Deposito	666,000,000				17.98%
	IUJK	45,000,000				1.21%
2.	Dana Perimbangan	288.434.390.109	87.94%			
	a. Bagi Hasil Pajak	20.500.000.000		7.11%		
	PBB 8,900,000,000				43.41%	
	PHTB	5,500,000,000			26.83%	
	PPH Pasal 21	6,100,000,000			29.76%	
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	684.390.109		0.24%		
	Profesi Sumberdaya Hutan	nihil				
	Pemb. Atas Hak Tanah Negara	Nihil				
	Pungutan Hasil Perikanan	684,390,109		0.24%	100.00%	
	c. Dana Alokasi Umum	255.350.000.000		88.53%		
	DAU 255,350,000,000				100.00%	
	d. Dana Alokasi Khusus	nihil				
	Dana Darurat	nihil				
	e. Dana Perimb. Dari Propinsi	11.900.000.000		4.13%		
	PKB/BBNKB	9,500,000,000			79.83%	
	PBB KB	2,400,000,000			20.17%	
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.560.000.000	1.70%			
	a. Dana Penyeimbang	5,060,000,000		91.01%		
	b. Dana Luncuran	500,000,000		8.99%		
	TOTAL	327.995.652.041				

Sumber : Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Triwulan I Tahun Anggaran 2002. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 4, tampak bahwa persentase PAD dari keseluruhan anggaran Kabupaten Sleman hanya sebesar 10,37%, sedangkan persentase dana perimbangan sangat besar, yaitu 87,94%. Dengan demikian, untuk meningkatkan kemandirian Kabupaten Sleman dalam anggaran pembangunannya perlu dilakukan usaha-usaha untuk menggali potensi dan mengembangkan PAD Kabupaten Sleman. Untuk data PAD Kabupaten Sleman, sumber terbesar adalah Pajak Daerah, yaitu 50,22% diikuti sumber Retribusi Daerah 27,78%, lain-lain sumber PAD 16,83% dan laba bersih Perusahaan Daerah 5,18%.

Berdasarkan penjelasan Tabel 4 tersebut ternyata kontribusi laba bersih Perusahaan Daerah atau BUMD paling rendah. Sehubungan dengan usaha pemerintah Kabupaten Sleman dalam membiayai secara lebih mandiri pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman, maka perlu diadakan kajian tentang potensi dan penggalan laba bersih BUMD PAD di Kabupaten Sleman agar dalam perkembangan waktu berikutnya kontribusi laba bersih BUMD bisa meningkat.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sumber PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa jenis pajak daerah (kabupaten/kota) dan tarif maksimumnya adalah pajak hotel (10%), pajak restoran (10%), pajak hiburan (35%), pajak reklame (25%), pajak penerangan jalan (10%),

pajak pengambilan bahan galian golongan C (20%), dan pajak parkir (20%). Di samping jenis pajak tersebut, daerah (kabupaten/kota) dapat menetapkan jenis pajak kabupaten/ kota yang lain tetapi memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat.
- e. potensinya memadai.
- f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- h. menjaga kelestarian lingkungan

Di samping pajak daerah kabupaten/kota, kabupaten/kota juga menerima (*share*) bagian pajak propinsi sebesar persentase tertentu yang terdiri dari:

- a. pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air tarif maksimum 5% (*share* minimum 30%).
- b. bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air tarif maksimum 10% (*share* minimum 30%).
- c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor tarif maksimum 5% (*share* minimum 70%).
- d. pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tarif maksimum 20% (*share* minimum 70%).

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Di samping itu, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menetapkan jenis retribusi lain sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang lebih ditetapkan. Jenis-jenis retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum
 - i. bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
 - ii. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- iii. jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan usaha yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - iv. jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
 - v. retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
 - vi. retribusi dapat dipungut secara efisien dan efektif, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - vii. pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang lebih baik
- b. Retribusi jasa usaha
- i. bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu.
 - ii. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
- c. Retribusi perijinan tertentu
- i. perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
 - ii. perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
 - iii. biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.
- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut:
- a. Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

- b. Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- c. Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

Analisis terhadap data PDRB Kabupaten Sleman, PDRB per kecamatan di Kabupaten Sleman, dan *Location Quotient* (LQ) per kecamatan di Kabupaten Sleman akan diperoleh sektor-sektor per kecamatan yang mempunyai nilai LQ lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil daripada 1 sehingga dapat diusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru dari sektor-sektor yang berpotensi ekonomi di Kabupaten Sleman yang berbasis di kecamatan-kecamatan. Dengan demikian, pembentukan BUMD baru yang menguntungkan akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dan mengembangkan kecamatan yang berpotensi secara ekonomi berdasarkan nilai LQ.

ANALISIS KAJIAN POTENSIDAN PENGGALIAN LABA BERSIH BUMD SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PAD DI KABUPATEN SLEMAN

Pada bagian ini akan dibahas analisis terhadap kajian potensi dan penggalan PAD Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi analisis terhadap sumber-sumber PAD -secara khusus laba bersih BUMD- Kabupaten Sleman. Posisi PAD Kabupaten Sleman terhadap total anggaran penerimaan Kabupaten Sleman dan posisi masing-masing sumber PAD Kabupaten Sleman terhadap PAD Kabupaten Sleman ditunjukkan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Komponen Anggaran Penerimaan dalam APBD Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2002

No.	SUBYEK	PERSENTASE DARI		
		JUMLAH	TOTAL	SUBTOTAL
1	Pendapatan Asli Daerah	34.001.261.932	10.37%	
	a. Pajak Daerah	17.07.636.139		50.22%
	b. Retribusi Daerah	9.443.952.700		27.78%
	c. Bagian Laba Perush. Daerah	1.761.360.635		5.18%
	d. Lain-lain PAD	5.721.312.458		16.82%
2	Dana Perimbangan	288.434.390.109	87.93%	
	a. Bagi Hasil Pajak	20.500.000.000		
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	684.390.109		
	c. Dana Alokasi Umum (DAU)	255.350.000.000		
	d. Dana Alokasi Khusus	Nihil		
	Dana Darurat	Nihil		
	e. Dana Perimb. Dari Propinsi	11.900.000.000		
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.560.000.000	1.70%	
	a. Dana Penyeimbang	5,060,000,000		
	b. Dana Luncuran	500,000,000		
	TOTAL	327.995.652.041		

Sumber : Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002. Data diolah.

Nampak pada Tabel 5, sumber anggaran utama Kabupaten Sleman adalah berasal dari Dana Perimbangan, yaitu sebesar 87,93%, disusul PAD 10,37%, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah sebesar 1,70%. Dengan demikian, anggaran penerimaan Kabupaten Sleman sangat bergantung pada penerimaan non PAD. Padahal dalam era otonomi daerah, kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunannya sangat diharapkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Kabupaten Sleman untuk

mengembangkan penerimaan utama dari PAD. Pada Tabel 6 tampak bahwa sumber PAD utama adalah pajak daerah (50,22%), kemudian retribusi daerah (27,78%), lain-lain PAD (16,82%), dan paling kecil persentasenya adalah bagian laba perusahaan daerah (5,18%). Hal ini juga terjadi pada tahun anggaran sebelumnya, yaitu dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 seperti yang disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Perkembangan Sumber Penerimaan PAD Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 1997/1998 - Tahun Anggaran 2001

Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba BUMD	Penerimaan Lain-lain	Jumlah PAD
1997/1998	6.307.064.984,82	3.450.573.395,00	708.029.761,57	2.999.213.148,51	13.464.881.289,90
1998/1999	7.229.182.708,87	3.466.829.646,00	883.219.551,51	3.207.183.131,62	14.786.415.038,00
1999/2000	9.185.908.717,58	5.551.344.263,90	728.790.632,33	1.659.401.098,41	17.125.444.712,22
2000	9.602.014.787,69	5.676.781.484,60	1.242.452.958,17	1.368.634.205,00	17.889.883.435,46
2001	16.069.014.396,26	8.268.612.581,75	1.743.565.085,30	3.489.961.151,122	29.571.153.214,43

Sumber : Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1997/1998 – 2001.

Berdasarkan Tabel 6, maka dapat dihitung persentase masing-masing sumber PAD terhadap PAD keseluruhan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7
Persentase Sumber-Sumber PAD Terhadap PAD Keseluruhan
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1997/1998 – 2001

Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba BUMD	Penerimaan Lain-lain	Jumlah PAD
1997/1998	46,84%	25,63%	5,26%	22,27%	100,00%
1998/1999	48,89%	23,45%	5,97%	21,69%	100,00%
1999/2000	53,64%	32,42%	4,26%	9,68%	100,00%
2000	53,67%	31,73%	6,94%	7,66%	100,00%
2001	54,34%	27,96%	5,90%	11,8%	100,00%

Sumber: Data diolah dari Tabel 6.

Dalam bagian ini akan dianalisis potensi pengembangan BUMD yang ada meliputi Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Pasar, dan PDAM

Kabupaten Sleman. Adapun persentase masing-masing sumber PAD yang berasal dari bagian laba perusahaan daerah ditunjukkan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Bagian Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Sleman Triwulan I Tahun Anggaran 2002

Bagian Laba BPD		Bagian Laba Bank Pasar dan PDAM		Bagian Laba Perusahaan Daerah	
Rp254.529.158,75	57,80%	Rp185.811.000,00	42,20%	Rp440.340.158,75	100%

Sumber : Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Triwulan I Tahun. Anggaran 2002. Data diolah

Nampak pada Tabel 8, sumber PAD dari bagian laba perusahaan daerah didominasi oleh penerimaan dari bagian laba BPD, yaitu sebesar 57,80% sedangkan penerimaan dari bagian laba Bank Pasar dan PDAM sebesar 42,20%. Dengan demikian, untuk meningkatkan PAD yang berasal dari sumber bagian laba perusahaan daerah yang masih relatif kecil (rata-rata sebesar 5,67%), dapat dilakukan dengan meningkatkan laba dari masing-masing sumber bagian laba perusahaan daerah. Hal itu berarti, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan

kinerja BPD dan masing-masing perusahaan daerah tersebut.

Peningkatan kinerja BPD dan masing-masing perusahaan daerah perlu dilakukan, di samping untuk meningkatkan laba BPD dan perusahaan daerah juga un-tuk meningkatkan efektivitas penerimaan laba BPD dan perusahaan daerah tersebut. Efektivitas penerimaan laba BPD dan perusahaan daerah selama ta-hun anggaran 1999/2000 - 2001 mengalami peningkatan, yaitu dari 68% menjadi 138%. Hal itu ditunjukkan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Efektivitas Penerimaan Laba BPD dan Perusahaan Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 1999/2000 - 2001

Tahun Anggaran	Anggaran (Target)	Realisasi	Efektivitas
1999/2000	Rp1.073.790.632,33	Rp728.790.632,33	68%
2000	Rp1.262.000.000,00	Rp1.242.452.958,17	98%
2001	Rp1.262.000.000,00	Rp1.743.565.085,30	138%

Sumber : Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1999/2000 - 2001. Data Diolah.

Peningkatan efektivitas penerimaan laba BPD dan perusahaan daerah Kabupaten Sleman itu menunjukkan bahwa kinerja BPD dan perusahaan daerah secara makro mengalami peningkatan. Peningkatan itu dimungkinkan karena pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tanggal 1 Januari 2001 telah “memaksa” pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk bekerja keras memperoleh sumber pembiayaan secara lebih mandiri dalam rangka pembiayaan APBD Kabupaten Sleman, yaitu dari sumber PAD. Dengan demikian, pemerintah daerah Kabupaten Sleman diharapkan tidak ragu lagi dalam menargetkan anggaran sumber penerimaan yang berasal dari laba BPD dan perusahaan daerah menjadi lebih besar mengingat realisasi atau efektivitas penerimaan laba BPD dan perusahaan daerah yang meningkat dari waktu ke waktu.

BPD Cabang Sleman

BPD adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan jasa-jasa keuangan. Bank sebagai *financial intermediary* mempunyai peran yang penting

dalam perekonomian. Pengelolaan bank membutuhkan adanya keterpaduan antara dua tujuan/kepentingan. Bank sebagai lembaga yang mencari keuntungan harus mempertimbangkan juga masalah keamanan dan likuiditas. Semakin likuid sebuah asset akan semakin kecil yang bisa dihasilkan oleh asset tersebut. Bank harus mempertimbangkan *trade-off* antara likuiditas dan profitabilitasnya.

Tujuan jangka panjang BPD adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan bisa diperoleh jika bank dikelola dengan manajemen yang tepat. Secara umum pengelolaan keuangan perusahaan akan menghadapi tiga masalah yang penting yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Untuk menjaga posisi BPD agar tetap likuid, BPD harus mengelola likuiditasnya dengan cara yang benar. Likuiditas bagi bank merupakan masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Dalam dunia perbankan sering timbul pertentangan antara kepentingan likuiditas dan profitabilitas. Untuk mempertahankan posisi likuiditas yang tinggi berarti harus menggunakan dana yang seharusnya bisa dipinjamkan untuk memperbesar

cadangan primer. Dengan demikian maka kesempatan untuk mendapatkan keuntungan akan berkurang. Pengelolaan likuiditas bisa dilakukan dengan dua pendekatan yaitu *assets management* dan *liability management*.

Menurut Neraca BPD per September 2001 dan 2002, terjadi peningkatan aktiva/passiva dari Rp751.155.000.000 menjadi Rp1.040.541.000.000 atau naik sebesar 38,53%. Kenaikan aktiva/passiva BPD menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja BPD. Apabila dilihat pada sisi aktiva Neraca BPD per September 2001 dan 2002 tersebut nampak bahwa aktiva terbesar terdapat pada pos kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp328.843.000.000 atau sebesar 43,78% per September 2001 dan Rp514.221.000.000 atau sebesar 49,41% per September 2002. Dengan demikian, selama periode 2001 sampai dengan 2002 BPD DIY mengalami kenaikan jumlah kredit yang diberikan sebesar 5,64%. Kenaikan jumlah kredit yang diberikan oleh BPD DIY tentunya akan menghasilkan pendapatan bunga yang

semakin meningkat pula. Hal ini ditunjukkan dengan rasio non performing loan (NPL) yang angkanya semakin menurun dari 3,64% menjadi 1,15%. NPL merupakan salah satu indikator kesehatan suatu bank yang menunjukkan persentase jumlah kredit yang bermasalah, misalnya kredit macet. Menurut ketentuan Bank Indonesia, bank yang sehat adalah bank yang mempunyai NPL kurang daripada 5%. Oleh karena nilai NPL BPD DIY semakin menurun berarti alokasi kredit yang disalurkan oleh BPD DIY semakin self liquidating. Dengan kata lain, semakin menurunnya nilai NPL BPD DIY menunjukkan bahwa pendapatan bunganya semakin meningkat.

Apabila dilihat pada sisi passiva Neraca BPD per September 2001 dan 2002 tersebut nampak bahwa passiva terbesar terdapat pada pos penerimaan giro, disusul penerimaan simpanan berjangka dan tabungan. Sisi passiva (tiga pos terbesar) Neraca BPD DIY per September 2002 dan 2002 ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 10
Sisi Passiva (tiga pos terbesar) Neraca BPD DIY
per September 2001 dan 2002

Pos	Per September 2001 (Rp juta)		Per September 2002 (Rp juta) (%)		Perubahan
	Rp	%	Rp	%	
Giro	Rp398.163	53,01%	Rp453.239	43,56%	-9,45%
Simpanan Berjangka	Rp102.778	13,68%	Rp229.216	22,03%	8,35%
Tabungan	Rp142.214	18,93%	Rp214.131	20,58%	1,65%

Sumber: Neraca BPD DIY per September 2001 dan 2002.

Berdasarkan Tabel 10, nampak bahwa pada Neraca BPD DIY per September 2001 penerimaan simpanan terbesar adalah giro (53,01%), disusul tabungan (18,93%) dan simpanan berjangka (13,68%). Sedangkan pada Neraca BPD DIY per September 2002 penerimaan simpanan terbesar adalah giro (43,56%), disusul simpanan berjangka (22,03%) dan tabungan (20,58%). Dengan demikian, selama periode 2001 sampai dengan 2002 BPD DIY mengalami penurunan simpanan giro sebesar 9,45%, kenaikan simpanan berjangka (8,35%), dan kenaikan tabungan (1,65%). Secara keseluruhan, simpanan giro, berjangka, dan tabungan BPD DIY per September 2001 sampai dengan

September 2002 mengalami kenaikan dari Rp643.155.000.000,- menjadi Rp896.586.000.000,- atau naik sebesar 39,40%.

Kenaikan jumlah ketiga simpanan di BPD DIY selama periode tersebut menunjukkan kinerja BPD DIY yang semakin meningkat yang oleh karenanya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang semakin meningkat pula. Meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di BPD DIY ditunjukkan oleh simpanan berjangka dan tabungan. Sedangkan simpanan giro mengalami penurunan. Dengan demikian, agar BPD DIY lebih mampu lagi dalam menggali sumber dana dan kemudian

disalurkan dalam berbagai alokasi kredit pinjaman maka BPD DIY harus mampu untuk menarik dana tabungan dari masyarakat sehingga kenaikannya lebih besar lagi (tidak hanya 1,65%). Di samping itu, BPD DIY juga harus mampu menarik dana masyarakat dalam bentuk giro terutama dari transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah propinsi dan kota atau kabupaten propinsi DIY atau propinsi lain. Karena simpanan giro menurut jenisnya lebih tepat untuk penabung masyarakat yang menggunakan rekeningnya terutama untuk keperluan transaksi bisnis. Penarikan dana dari masyarakat dan pengalokasiannya di BPD DIY,

khususnya BPD Cabang Sleman yang semakin meningkat tersebut karena ditunjang oleh lima Kantor Cabang Pembantu (Condongcatur, Prambanan, Godean, Pakem, dan Gamping) dan sepuluh Kantor Kas (Tempel, Maguwoharjo, Ngemplak, Ngaglik, Mlati, Turi, Berbah, Seyegan, Moyudan, dan RSUD Morangan).

Apabila dilihat pada indikator kesehatan bank yang ditentukan oleh Bank Indonesia, nampak indikator BPD DIY telah memenuhi persyaratan dan dengan demikian termasuk bank yang sehat. Indikator kesehatan BPD DIY dan ketentuan Bank Indonesia disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Indikator Kesehatan BPD DIY per September 2001 dan 2002

Indikator	BPD DIY per September 2001	BPD DIY per September 2001	Indikator Bank Indonesia
Capital Adequacy Ratio (CAR)	22,12%	15,58%	minimum 8%
Non Performing Loan (NPL)	3,64%	1,15%	maksimum 5%
Return On Assets (ROA)	4,05%	4,08%	-
Return on Equity (ROE)	27,09%	30,12%	-
Loan to Deposit Ratio (LDR)	51,46%	57,32%	maksimum 100%

Sumber: Neraca BPD DIY per September 2001 dan 2002.

Nampak pada Tabel 11 indikator BPD DIY untuk CAR, NPL, dan LDR semua memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Untuk CAR memang mengalami penurunan tetapi masih di atas minimum 8%. Untuk NPL mengalami penurunan sehingga menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan BPD DIY semakin self liquidating atau semakin kecil kredit macet yang terjadi. Untuk LDR mengalami kenaikan berarti terjadi peningkatan alokasi kredit untuk investasi. Peningkatan LDR yang diimbangi dengan penurunan NPL menunjukkan bahwa alokasi kredit untuk investasi telah memenuhi prudent banking.

Peningkatan kinerja BPD DIY dapat diartikan juga sebagai peningkatan kinerja BPD Sleman karena pemerintah daerah Kabupaten Sleman merupakan pemilik ketiga terbesar yaitu sebesar 13% setelah pemerintah Propinsi DIY (54%) dan pemerintah Kota Yogyakarta (13,58%). Sebagai pemilik terbesar ketiga

sebesar 13%, maka setoran bagian laba BPD Sleman dalam setoran laba BUMD (salah satu komponen PAD) pada tahun anggaran 2002 (triwulan I) mencapai Rp254.529.158,75 atau 57,80% dari bagian laba BUMD yang sebesar Rp440.340.158,75.

Untuk meningkatkan kinerja BPD secara keseluruhan (termasuk BPD DIY), ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0207/29/ekonomi/meng38.htm>), yaitu:

1. Risiko penurunan dana dan aktiva karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang habis dialokasikan dalam satu tahun anggaran.
2. Serbuan bank-bank pesero dan bank asing dalam memperebutkan DAU.
3. Pemenuhan standar dan ketentuan sebagai universally regulated institutions, misalnya ketentuan CAR.

4. Aktiva produktif yang relatif homogen.
5. Nasabah BPD yang sebagian besar merupakan nasabah berskala kecil dan menengah yang kurang memberikan nilai tambah bagi bank untuk maju dan berkembang untuk bersaing secara global.

Untuk memenangkan persaingan global, berdasarkan studi yang dilakukan oleh McKinsey maka BPD DIY perlu memperhatikan beberapa strategi yang cukup relevan dengan situasi perbankan nasional, yaitu:

1. *Securing the lifeline* atau mengamankan garis kehidupan bank.
2. *Refocusing* atau melakukan fokus operasional bank pada target pasar.
3. Menawarkan berbagai produk baru perbankan, seperti *trade services*, tanpa meninggalkan sektor UKM yang sudah teruji.
4. Meningkatkan kemampuan dalam beberapa bidang utama, seperti manajemen risiko.

Di samping itu, menurut Marihot H. Tambunan (Kompas, 16 Maret 2001 hal. 15) BPD perlu melakukan reposisi, yaitu pengambilan posisi yang aman dan meng-untungkan untuk menjalankan bisnis BPD dalam kancan persaingan setelah melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis dan para pesaing BPD. Reposisi dilakukan dengan:

1. Mengubah status badan hukum BPD menjadi perseroan terbatas (PT).
2. Meningkatkan modal.
3. Mengubah citra dan segmentasi, seperti yang dilakukan oleh BPD DKI menjadi Bank DKI dan BPD Jatim menjadi Bank Jatim.
4. Internasionalisasi dengan mengubah menjadi bank devisa dan membangun jaringan corespondent banking.
5. Mencermati posisi dewan komisaris terutama posisi komisaris utama.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) “Bank Pasar” Kabupaten Sleman

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) “Bank Pasar” sebagai BUMD di Kabupaten Sleman berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. PD BPR “Bank Pasar” didirikan dengan maksud

dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. PD BPR “Bank Pasar” mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. Tugas PD BPR “Bank Pasar” adalah me-ngem-bangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Adapun fungsi PD BPR “Bank Pasar”:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khusus pada pengusaha kecil;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan dan keuangan lainnya;
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, bentuk layanan PD BPR “Bank Pasar” terhadap masyarakat kabupaten berupa:

- a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khusus pada pengusaha kecil.

Adapun penggunaan laba bersih PD BPR “Bank Pasar” berdasarkan pasal 35 Peraturan Da-erah Kabupaten Sleman Nomor 30 tahun 1995, ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|-----|
| a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah | 40% |
| b. Cadangan umum | 20% |
| c. Cadangan tujuan | 20% |
| d. Dana kesejahteraan | 10% |
| e. Jasa produksi | 10% |

Persentase sumbangan laba Bank Pasar Kabupaten Sleman terhadap bagian laba perusahaan daerah Kabupaten Sleman sebesar 42,18%. Sedangkan persentase sumbangan laba Bank Pasar Kabupaten Sleman terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002 sebesar 0,23%. Sementara persentase sumbangan laba perusahaan daerah Kabupaten Sleman terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002 sebesar 5,18%.

Tabel 12
Bagian Laba Perusahaan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002

Bagian Laba BPD		Bagian Laba Bank Pasar		Bagian Laba PDAM		Bagian Laba Perusahaan Daerah	
Rp1.018.116.635	57,80%	Rp743.000.000	42,18%	Rp244.000	2%	1.761.360.635	100%

Sumber: Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002.

Berdasarkan Tabel 12 tersebut, nampak bahwa bagian laba Bank Pasar Kabupaten Sleman terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002 maupun terhadap bagian laba perusahaan daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan bagian laba BPD. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup operasional BPD yang lebih luas daripada Bank Pasar Kabupaten Sleman. Tetapi melihat persentase BPD yang cukup besar itu, seharusnya Bank Pasar Kabupaten Sleman dapat melakukan berbagai strategi perbankan seperti yang dilakukan oleh BPD.

Mengingat laba bersih Bank Pasar Kabupaten Sleman yang disetor ke pemerintah daerah Kabupaten Sleman berdasarkan pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 30 tahun 1995 ditetapkan sebesar 40%, maka jumlah laba yang disetor adalah $40\% \times \text{Rp}1.409.674.000,- = \text{Rp}563.869.600,-$ pada tahun 1999. Pada tahun 2000 jumlah laba yang disetor adalah $40\% \times \text{Rp}1.813.621.000,- = \text{Rp}725.448.400,-$. Dengan demikian, pada kurun waktu 1999-2000 jumlah laba yang disetor Bank Pasar Kabupaten Sleman ke pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengalami kenaikan sebesar 28,66%. Kenaikan jumlah laba yang disetor oleh Bank Pasar Kabupaten Sleman ke pemerintah daerah Kabupaten Sleman menunjukkan adanya peningkatan kinerja Bank Pasar Kabupaten Sleman, mengingat laba merupakan selisih antara pendapatan dan non pendapatan dengan beban dan non beban operasional.

Pada tahun 1999-2000, ternyata pemerintah daerah Kabupaten Sleman melakukan peningkatan setoran ke Bank Pasar Kabupaten Sleman sebesar $\text{Rp}1.858.814.000,-$ naik menjadi $\text{Rp}2.483.814.000,-$ atau mengalami kenaikan sebesar 33,62%. Apabila dibandingkan antara setoran laba Bank Pasar ke ke pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang sebesar

28,66% dengan setoran modal pemerintah daerah Kabupaten Sleman ke Bank Pasar Kabupaten Sleman yang sebesar 33,62% maka efektivitas Bank Pasar dalam menggunakan setoran modal dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman masih kurang, karena angkanya hanya menunjukkan sebesar $28,66\% : 33,62\% = 85,25\%$ atau kurang daripada 100%. Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, Bank Pasar Kabupaten Sleman harus mampu meningkatkan kinerja bank melalui berbagai usaha, seperti:

- meningkatkan berbagai sumber dana bank (pada sisi kewajiban dan ekuitas).
- meningkatkan berbagai sumber penggunaan dana bank (pada sisi aktiva).

Menurut Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 dan 2000, terjadi peningkatan aktiva/passiva dari $\text{Rp}14.765.570.000$ menjadi $\text{Rp}17.399.802.000$ atau naik sebesar 17,84%. Kenaikan aktiva/passiva Bank Pasar Kabupaten Sleman menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja Bank Pasar Kabupaten Sleman. Apabila dilihat pada sisi aktiva Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 dan 2000 tersebut nampak bahwa aktiva terbesar terdapat pada pos kredit yang diberikan yaitu sebesar $\text{Rp}11.549.276.000$ atau sebesar 78,22% per 31 Desember 1999 dan $\text{Rp}14.713.080.000$ atau sebesar 84,56% per 31 Desember 2000. Dengan demikian, selama periode 1999 sampai dengan 2000 Bank Pasar Kabupaten Sleman mengalami kenaikan jumlah kredit yang diberikan sebesar 6,34%. Kenaikan jumlah kredit yang diberikan oleh Bank Pasar Kabupaten Sleman tentunya akan menghasilkan pendapatan bunga yang semakin meningkat pula.

Apabila dilihat pada sisi passiva Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 dan 2000 tersebut nampak bahwa passiva (dana simpanan

dari masyarakat) terbesar terdapat pada pos penerimaan tabungan, disusul penerimaan deposito berjangka. Sisi passiva (dua pos terbesar) Neraca Bank Pasar

Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 dan 2000 ditunjukkan pada Tabel 13.

Tabel 13
Sisi Passiva (tiga pos terbesar) Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 dan 2000

Pos	Per September 2001 (Rp juta)		Per September 2002 (Rp juta) (%)		Perubahan
Tabungan	5.940.301	40,23%	7.197.552	41,37%	1,14%
Deposito Berjangka	1.477.420	10,01%	1.519.920	8,74%	-1,27%

Sumber: Neraca BPD DIY per September 2001 dan 2002.

Berdasarkan Tabel 13, nampak bahwa pada Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 penerimaan simpanan terbesar adalah tabungan (40,23%), disusul deposito berjangka (10,01%). Sedangkan pada Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 2000 penerimaan simpanan terbesar adalah tabungan (41,37%), disusul deposito berjangka (8,74%). Dengan demikian, selama periode 1999 sampai dengan 2000 Bank Pasar Kabupaten Sleman mengalami kenaikan tabungan sebesar 1,14% dan penurunan deposito berjangka (1,27%). Secara keseluruhan, simpanan tabungan dan deposito berjangka Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 sampai dengan 31 Desember 2000 mengalami kenaikan dari Rp7.417.721.000 menjadi Rp8.717.472.000,- atau naik sebesar 17,52%.

Kenaikan jumlah kedua simpanan di Bank Pasar Kabupaten Sleman selama periode tersebut menunjukkan kinerja Bank Pasar Kabupaten Sleman yang semakin meningkat yang oleh karenanya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang semakin meningkat pula. Meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di Bank Pasar Kabupaten Sleman ditunjukkan oleh tabungan. Sedangkan simpanan deposito berjangka mengalami pe-nurunan. Dengan demikian, agar Bank Pasar Kabupaten Sleman lebih mampu lagi dalam menggali sumber dana dan kemudian disalurkan dalam berbagai alokasi kredit pinjaman maka Bank Pasar Kabupaten Sleman harus mampu untuk menarik dana tabungan dari masyarakat sehingga kenaikannya lebih

besar lagi. Di samping itu, Bank Pasar Kabupaten Sleman juga harus mampu menarik dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka.

Peningkatan kinerja Bank Pasar Kabupaten Sleman dapat diartikan juga sebagai peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Sleman karena pemerintah daerah Kabupaten Sleman merupakan pemilik utama yaitu sebesar 100%. Sebagai pemilik utama, maka setoran bagian laba Bank Pasar Kabupaten Sleman masuk ke kas pemerintah Kabupaten Sleman sebagai setoran laba BUMD (salah satu komponen PAD).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sleman

PDAM Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Dati II Sleman, mulai beroperasi sejak tanggal 2 Nopember 1992. Pada saat ini, PDAM Kabupaten Sleman mengelola dan mengoperasikan 12 sistem yang terbagi menjadi 5 Cabang Wilayah Operasional. Air baku diperoleh dari 26 sumur bor dan 3 mata air dengan total kapasitas terpasang 352 liter/detik yang 98% sistem pendistribusiannya dilaksanakan dengan pemompaan. Rata-rata operasi adalah 20 jam dengan pemanfaatan produksi kepada pelanggan sebanyak sambungan rumah (16.464 unit) dan hidran umum (203 unit) dengan cakupan layanan sebanyak 126.341 jiwa. Tingkat kehilangan air PDAM masih cukup tinggi, yaitu sebesar 27,70% (Laporan Penelitian PDAM Kabupaten Sleman

dan STIE YKPN Yogyakarta, tahun 2001, hal. 8). Tingkat kehilangan air PDAM Kabupaten Sleman tersebut memang lebih rendah daripada tingkat kehilangan air PDAM rata-rata nasional yang sebesar 40% (Risyaana Sukarma, PDAM dan Manajemen Krisis, <http://www.geocities.com/CollegePark/Union/5974/risyana.html>).

PDAM Kabupaten Sleman sebagai BUMD Kabupaten Sleman memiliki potensi dan peluang yang cukup baik untuk berkembang sesuai dengan perkembangan pembangunan dan peningkatan kemampuan masyarakat. Usaha peningkatan kinerja PDAM Kabupaten Sleman dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut ini (Laporan Penelitian PDAM Kabupaten Sleman dan STIE YKPN Yogyakarta, tahun 2001, hal. 13):

a. Mengubah sikap operasional dari birokrasi ke wirausaha.

- b. Memahamkan kepada pegawai bahwa konsumen adalah aset perusahaan terbesar.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana operasional dengan memantapkan sarana produksi air bersih sehingga layak beroperasi.
- d. Memantapkan sistem manajemen operasional dalam hal penyiapan perangkat lunak, perangkat keras, dan peningkatan sumberdaya manusia.
- e. Membuat program jangka pendek dan jangka panjang sebagai arah operasional.
- f. Melakukan pemetaan terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi PDAM Kabupaten Sleman. Tantangan muncul karena adanya kelemahan, sedangkan peluang muncul karena adanya kekuatan.

Berdasarkan penggunaan air sumur dengan pompa yang dioperasikan dan dilaporkan kepada Dinas Perindustrian Propinsi DIY tahun 2000 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 14
Rata-Rata Penggunaan Air Bersih dalam M³ Per Bulan dan Liter
Berdasarkan Pompa yang Dioperasikan di Kabupaten Sleman Tahun 2000

No	Pelanggan		Rata-Rata Pemakaian/Bulan		Nilai Rupiah per Bulan
	Nama	Jenis	M ³	Liter	
1	Hotel berbintang	Niaga besar	97.718	35,91	207.010.360
2	Hotel melati	Niaga kecil	69.242	26,28	133.640.980
3	Lembaga pendidikan	Niaga besar	24.187	9,01	50.986.680
4	Restoran	Niaga besar	7.117	2,86	14.915.500
5	Rumah sakit	Niaga besar	30.439	11,55	64.482.380
6	Cuci kendaraan	Niaga kecil	705	0,28	1.254.300
7	Instansi	Niaga kecil	3.610	1,37	6.962.900
8	Kolam renang	Niaga kecil	2.299	0,87	4.443.860
9	Asrama/pondokan	Niaga kecil	614	0,23	1.150.660
10	Industri	Industry besar	52.534	21,1	208.187.920
	TOTAL	288.465	109,47	693.035.540	

Sumber: Laporan Penelitian PDAM Kabupaten Sleman dan STIE YKPN Yogyakarta, tahun 2001, hal. 19.

Dengan demikian, menurut Tabel 14 PDAM Kabupaten Sleman diperkirakan akan memperoleh penerimaan sebesar Rp693.035.450,- per

bulan dengan permintaan air bersih berbagai pelanggan sebanyak 288.465M³. Apabila dihitung dalam 1 tahun (selama tahun 2000) PDAM Kabupaten Sleman

diperkirakan mengalami permintaan air bersih sebanyak 3.461.580M³. Realisasi permintaan air bersih PDAM Kabupaten Sleman hanya sebanyak 2.653.291M³ (Laporan Tahunan Direksi PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2001, Materi Ekspose). Dengan demikian, efektivitas permintaan air bersih hanya mencapai 76,65%. Penerimaan PDAM Kabupaten Sleman dalam tahun 2000 diperkirakan mencapai Rp8.316.425.400,-. Realisasi penerimaan air bersih PDAM Kabupaten Sleman hanya sebesar Rp2.217.073.300,- (Laporan Tahunan Direksi PDAM Kabupaten Sleman Tahun

2001, Materi Ekspose). Dengan demikian, efektivitas penerimaan air bersih hanya mencapai 26,66%. Berdasarkan efektivitas kedua hal itu yang masih rendah, maka PDAM Kabupaten Sleman harus meningkatkan kinerjanya sehingga mampu mencapai angka efektivitas yang lebih tinggi lagi dan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap laba BUMD pada PAD Kabupaten Sleman. Kontribusi setoran laba PDAM Kabupaten Sleman kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman dari tahun 1994 - 1999 ditunjukkan pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15
Setoran Laba PDAM Kabupaten Sleman
Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 1994 - 1999

Tahun	Nilai Setoran Laba PDAM	Pertumbuhan
1994	Rp 1.800.000,-	-
1995	Rp 2.100.000,-	1,67%
1996	Rp 10.000.000,-	376,19%
1997	Rp 20.000.000,-	100,00%
1998	Rp105.000.000,-	425,00%
1999	Rp 55.000.000,-	47,62%

Sumber : Laporan Tahunan Direksi PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2001, Materi Ekspose.

Berdasarkan Tabel 15, nampak bahwa pertumbuhan setoran laba PDAM Kabupaten Sleman kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi. Hal ini berarti kinerja PDAM Kabupaten Sleman masih labil. Untuk itu, PDAM Kabupaten Sleman perlu melakukan berbagai kebijakan perusahaan baik internal maupun eksternal agar kinerjanya makin baik sehingga setoran labanya kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman juga makin meningkat. Setoran laba yang makin meningkat pada akhirnya akan menambah PAD Kabupaten Sleman.

Untuk mengurangi tingkat kehilangan air dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu pekerjaan fisik, seperti pekerjaan pemasangan pipa distribusi sekunder/tersier serta sambungan rumah. Pekerjaan pemasangan pipa distribusi kurang mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan paket-paket kontrak pekerjaan yang

melibatkan rekanan-rekanan dari golongan ekonomi lemah. Sambungan rumah yang menggunakan bahan-bahan bermutu rendah juga sangat memungkinkan terjadinya kebocoran air. Di samping meningkatkan mutu pekerjaan fisik, tingkat kehilangan air dapat juga dikurangi dan dicegah dengan meningkatkan kualitas para karyawan yang menjadi sumberdaya manusia di PDAM Kabupaten Sleman, seperti mengurangi terjadinya kesalahan pembacaan meter, pencatatan yang kurang cermat, dan kesalahan-kesalahan administratif lainnya.

Usulan menaikkan tarif PDAM memang akan menaikkan pula pendapatan PDAM Kabupaten Sleman yang akhirnya juga akan meningkatkan setoran labanya kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman sehingga pada akhirnya akan menambah PAD Kabupaten Sleman. Tetapi usulan menaikkan tarif PDAM akan banyak

menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat dan DPRD Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, PDAM Kabupaten Sleman perlu menjelaskan alasan kenaikan tarif PDAM dengan berbagai pertimbangan penjelasan (Risya Sukarma, PDAM dan Manajemen Krisis, <http://www.geocities.com/CollegePark/Union/5974/risyana.html>). Pertama, penjelasan mengenai segmen pelanggan. Kenaikan tarif PDAM akan sangat terasa bagi pelanggan dengan pendapatan rendah, tetapi tidak akan begitu terasa bagi pelanggan dengan pendapatan menengah ke atas. Dengan demikian sasaran kenaikan tarif PDAM perlu ditujukan kepada segmen pelanggan dengan pendapatan menengah ke atas.

Kedua, kenaikan tarif PDAM berkaitan langsung dengan kenaikan tingkat pemakaian. Makin banyak pemakaian makin tinggi tarifnya. Bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, pemakaian air akan dilakukan secara hemat hanya untuk kebutuhan dasarnya yang berupa minum dan memasak. Untuk kebutuhan dasar itulah, tarif air harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat bukan pelanggan PDAM yang umumnya justru membeli air lebih mahal. Ketiga, tarif PDAM umumnya dihitung dengan pemakaian dalam m³. Tidak semua orang dapat membayangkan banyaknya air dalam m³. Satu m³ sama dengan 1.000 liter atau lima drum @200 liter, atau 40 jerigen @25 liter. Apabila harga rata-rata air PDAM adalah Rp300,- per m³, maka harga satu drum adalah Rp60,- atau Rp7,50 per jerigen, atau Rp0,30 per liter. Bandingkan dengan air kemasan yang harganya 4.000 kali (sekitar Rp1.800,- per 1,5 liter atau Rp1.200,- per liter). Tentu tidak adil membandingkan air minum PDAM dengan air kemasan yang begitu praktis dan dapat diminum di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi adilkah menganggap air PDAM mahal hanya karena tidak dapat langsung diminum, padahal dapat diperoleh langsung. Menganggap air PDAM tidak layak minum pun sebenarnya kurang tepat. Air hasil produksi PDAM apabila diperoleh langsung di tempat di mana air tersebut diproduksi pada instalasi pengolahan atau mata air di mana air yang akan didistribusikan telah terlebih dahulu diberi desinfektan juga layak minum.

Penilaian kinerja PDAM Kabupaten Sleman mempertimbangkan komponen biaya operasional yang sangat tergantung dengan kondisi ekonomi, misalnya biaya bahan bakar untuk mesin-mesin PDAM. Oleh karena itu, apabila biaya bahan bakar naik (misalnya

pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak), maka biaya operasional menjadi semakin mahal. Sedangkan untuk mengubah tarif harga jual air ke pelanggan sangat tidak mudah, artinya harus melalui beberapa proses sementara biaya operasional sudah naik terlebih dahulu. Hal inilah yang menyebabkan mengapa setoran laba PDAM kepada pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 1998-1999 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 47,62% atau menurun dibandingkan pertumbuhan setoran laba PDAM kepada pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 1997-1998 yang naik sebesar 425%.

Analisis Potensi Penggalan Terhadap Pembentukan BUMD Baru

Menurut AR Karseno (2001), BUMD pada masa lalu merupakan lembaga usaha daerah yang didirikan untuk menciptakan aktivitas bisnis di daerah dan digunakan untuk menyerap anggaran pembangunan daerah yang tidak atau kurang termanfaatkan. Peran pemerintah pusat di dalam mendesain dan mengarahkan BUMD terasa sangat kentara karena sebagian BUMD didirikan dengan visi pemerintah pusat karena BUMD dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis pemerintah pusat di daerah.

Dalam perkembangannya, BUMD menjadi sangat bermanfaat sebagai tempat untuk menyerap tenaga kerja di daerah. Tetapi keberadaan BUMD dengan visi yang berasal dari pemerintah pusat dan adanya ketersediaan tenaga kerja (sumberdaya manusia) lokal yang kurang memadai malah menimbulkan ketidakefektifan misalnya, BUMD menjadi usaha bisnis yang tidak sehat dan tidak efisien karena dukungan dan proteksi sistem birokrasi yang sangat sentralistik. Manajer BUMD mempunyai jiwa birokrat dan bukan jiwa wirausaha.

Krisis ekonomi yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan munculnya dua undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah) berdampak terhadap pengelolaan BUMD, yaitu menjadi lebih profesional. Hal ini disebabkan laba BUMD menjadi salah satu sumber anggaran APBD, artinya apabila pada masa lalu ada BUMD yang rugi maka akan memperoleh subsidi tetapi dengan otonomi

daerah per 1 Januari 2001, BUMD harus mampu memperoleh laba yang sebagian disetorkan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu sumber penerimaan APBD. Dengan demikian, pemerintah daerah harus melakukan reposisi terhadap pengelolaan BUMD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Termasuk dalam mendirikan BUMD baru harus berlandaskan pada alasan yang rasional, misalnya dengan memperhatikan faktor endowment yang dimiliki masing-masing daerah.

Analisis potensi penggalan terhadap pembentukan BUMD baru menggunakan data PDRB Kabupaten Sleman, PDRB per kecamatan di Kabupaten Sleman, dan Location Quotient (LQ) per kecamatan di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil analisis terhadap data tersebut akan diperoleh sektor-sektor per

kecamatan yang mempunyai nilai LQ lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil daripada 1 sehingga dapat diusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru dari sektor-sektor yang berpotensi ekonomi di Kabupaten Sleman yang berbasis di kecamatan-kecamatan. Munculnya BUMD baru yang berbasis di kecamatan-kecamatan, akan sejalan dengan rencana pembangunan makro Kabupaten Sleman. Dengan demikian, pembentukan BUMD baru akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dan mengembangkan kecamatan yang berpotensi ekonomi (berdasarkan nilai LQ) sebagai pusat pertumbuhan Kabupaten Sleman. Berdasarkan penghitungan nilai LQ untuk Kabupaten Sleman per lapangan usaha yang hasil penghitungannya dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16
Location Quotient (LQ) Lapangan Usaha (Sektor)
Kabupaten Sleman Tahun 1999

NO	LAPANGAN USAHA	LQ
1	Pertanian	0.8661
2	Pertambangan dan Penggalan	0.2747
3	Industri Pengolahan	0.8796
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.1481
5	Bangunan	1.1867
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.0020
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.9066
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.3451
9	Jasa-Jasa	1.1326

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupaten Sleman.

Nampak pada Tabel 16, beberapa sektor atau lapangan usaha di Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai LQ lebih besar daripada 1, yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Besarnya nilai LQ yang lebih besar daripada 1 untuk sektor-sektor di Kabupaten Sleman tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memungkinkan untuk dikembangkan. Apabila sektor-sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar daripada 1 dikelompokkan dalam kategori 3 sektor, maka

sektor-sektor di Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai LQ lebih besar daripada 1 ternyata termasuk dalam kategori sektor jasa. Dengan demikian, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sleman perlu memperhatikan hal tersebut karena berkaitan dengan penyediaan lahan dan prasarana lainnya yang dibutuhkan. Termasuk dalam hal ini adalah kemungkinan dalam mengembangkan dan membentuk BUMD di Kabupaten Sleman. Artinya, BUMD yang dapat dikembangkan dan dibentuk di Kabupaten Sleman adalah BUMD yang berkaitan dengan sektor-

sektor yang mempunyai kemungkinan potensi untuk dikembangkan mengingat nilai LQ sektor yang lebih besar daripada 1. Menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X (2001), BUMD yang dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah daerah merupakan BUMD sebagai bagian mutlak pendayagunaan aset dan lembaga ekonomi daerah yang dimiliki pemerintah daerah untuk menjadikannya profit center agar mampu menjadi sumber penerimaan anggaran APBD.

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan kesiapan sumberdaya dan anggaran pembangunan (APBD). Peningkatan anggaran penerimaan dalam APBD dapat dilakukan melalui penerimaan PAD khususnya dari setoran laba bersih BUMD. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pemerintah daerah Kabupaten Sleman seharusnya tidak ragu lagi dalam menargetkan anggaran sumber penerimaan yang berasal dari laba BPD dan BUMD lainnya menjadi lebih besar mengingat realisasi atau efektivitas penerimaan laba BPD dan BUMD lainnya meningkat dari waktu ke waktu. Agar setoran laba bersih BUMD terhadap PAD dan APBD Kabupaten Sleman meningkat pada tahun-tahun mendatang maka BUMD yang sudah ada maupun

BUMD yang akan dikembangkan berdasarkan analisis ekonomi LQ hendaknya dikelola dengan memperhatikan berikut ini (Sri Sultan Hamengku Buwono X, 2001):

- a. Membangun persepsi melalui image building BUMD sebagai entitas bisnis dan mengubah visi bisnis dari *inward-oriented market strategy* menjadi *outward-looking strategy*.
- b. Melakukan dialog berkelanjutan antara kelompok-kelompok pembaharu di dalam dan luar pemerintahan untuk mendapat konsensus dengan pihak legislatif sehingga memungkinkan penerbitan peraturan daerah yang dapat menjadi wahana menciptakan fleksibilitas BUMD.
- c. Meningkatkan keunggulan bersaing BUMD dalam menyiasati proses globalisasi ekonomi.
- d. Melakukan transparansi dalam rekrutmen tenaga profesional maupun dalam pemanfaatan aset, penyertaan saham, dan pemilihan mitra strategis BUMD.
- e. Mendorong perubahan watak dari lembaga birokrasi dan instrumen kekuasaan menjadi korporasi berorientasi profit yang profesional.
- f. Memilih strategi pada tingkatan unit bisnis yang lebih fokus dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. [HTTP: //kompas. kampus kita.com/fiscal_01.html](http://kompas.kampuskita.com/fiscal_01.html).

AR Karseno. Reposisi BUMD Pasca UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Makalah Seminar. 2001.

Bisnis Indonesia. 1 Desember 1999.

_____. 22 Desember 1999.

Bank Pasar Kabupaten Sleman. Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 dan 2000.

Bank Pembangunan Daerah DIY. Neraca BPD per September 2001 dan 2002.

BPS Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 1999. 2000.

_____. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dati II Sleman Tahun 1993-1997. 1998.

_____. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dati II Sleman Tahun 1995-1999. 2000.

BPS Propindi DIY. DIY Dalam Angka 1999. 2000.

Budiono. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4: Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE. Yogyakarta. 1992.

Budiono Sri Handoko. Pembangunan Regional. PPE FE UGM dan Deptan RI. Yogyakarta. 1984.

_____. Interaksi antara Desa dan Kota. PPE FE UGM dan Deptan RI. Yogyakarta-ta. 1985.

Dumairy. Perekonomian Indonesia. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1996.

Gamma. Rancangan Perda Berselema Protes. [HTTP://www. Gamma.co.id/ artikel/42-3/ hukum-GM10112-692.shtml](http://www.Gamma.co.id/artikel/42-3/hukum-GM10112-692.shtml).

Gunawan Sumodiningrat. Agenda Pemantapan Otonomi Daerah: Suatu Pokok Pikiran. Seminar Nasional Otonomi Daerah. ISEI Yogyakarta. 1999.

Hadwi Soendjojo. Peta dan Otonomi Daerah. [HTTP://www.Plengkung.co.id/ Article/DH190120011.shtml](http://www.Plengkung.co.id/Article/DH190120011.shtml).

_____. Reformasi Kebijakan Perolehan Data Spasial. [HTTP://www. plengkung.co.id/ Article DH190120013.shtml](http://www.plengkung.co.id/Article/DH190120013.shtml).

[http://www.kompas.com/ kompas-cetak/0207/ 29/ekonomi/meng38.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0207/29/ekonomi/meng38.htm).

<http://www.sidoarjo.go.id>.

<http://www.sleman.go.id>.

Inventarisasi Aset Pemprov Dimanipulasi? [HTTP://www.fajar.co.id/berita/05-2002/ 7metro-4.htm](http://www.fajar.co.id/berita/05-2002/7metro-4.htm).

Kadariah. Ekonomi Perencanaan. LP FE UI. Jakarta. 1989.

Kompas. 16 Desember 1999.

_____. 7 Desember 2000.

_____. 7 Januari 2001.

_____. 16 Maret 2001.

_____. 26 Nopember 2001.

_____. 15 Desember 2001.

Koran Tempo. Lamongan dan Semangat Otonomi Daerah. [HTTP://www.tempo.interaktif.com/korantempo/news/2002/2/18/nusantara/79.html](http://www.tempo.interaktif.com/korantempo/news/2002/2/18/nusantara/79.html).

Laporan Penelitian PDAM Kabupaten Sleman dan STIE YKPN Yogyakarta, tahun 2001.

Laporan Tahunan Direksi PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2001, Materi Ekspose.

Lincoln Arsyad. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan: Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta. 1999.

Mahbub ul Haq. Tirai Kemiskinan: Tantangan-tantangan Untuk Dunia Ketiga. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1983.

Meningkatkan PAD ala Kota Solo. [HTTP://www.build.or.id/Newsletter/Terobosan/terobosan6.htm](http://www.build.or.id/Newsletter/Terobosan/terobosan6.htm).

Mubyarto. Pembangunan Dengan Pemerataan. Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM. Yogyakarta. 1992.

Mudrajad Kuncoro. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. UPP AMPYKPN. Yogyakarta. 1997.

Pemerintah Kabupaten Sleman. Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Triwulan I Tahun Anggaran 2002. 2002.

_____. Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1997/1998–2001.

Proceedings. Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan Potensi Daerah. ISEI Yogyakarta. 1999.

Raksaka Mahi. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah. Makalah Seminar. 2001.

Risyana Sukarma, PDAM dan Manajemen Krisis, <http://www.geocities.com/CollegePark/Union/5974/risyana.html>

Rudy Badrudin. “Pengembangan Wilayah Propinsi DIY (Pendekatan Teoritis)”. Jurnal Ekonomi Pembangunan FE UII. Yogyakarta. 2000.

Saving, Jason L. “Privatization and The Transition to a Market Economy.” Economic Review(Federal Reserve Bank of Dallas) Journal. Fourth Quarter 1998. p: 17-25.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. Penerbit Kuraiko Pratama. Bandung. 1999.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Beberapa Peraturan Pemerintah Bidang Dana Perimbangan Nomor 104, 105, 106, dan 107. Penerbit PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta. 2001.

Soeharsono Sagir. *Ekonomi Indonesia: Gagasan, Pemikiran, dan Polemik*. Penerbit Iqra. Bandung. 1981.

Sri Sultan Hamengku Buwono X. *Pengembangan Strategis BUMD Dalam Otonomi Daerah Propinsi DIY*. Makalah Seminar. 2001.

Suara Merdeka. *Perda Retribusi Bermunculan, Hasil Belum Optimal*. [HTTP://www.suaramerdeka.com/harian/0205/01/kot13.htm](http://www.suaramerdeka.com/harian/0205/01/kot13.htm).

Subagyo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Ed. 2. BP STIE YKPN Yogyakarta. Yogyakarta. 2002.

Sukanto R. dan AR Karseno. *Ekonomi Perkotaan*. Ed. 3. BPFE. Yogyakarta. 1997.

Suwarjoko Warpani. *Analisis Kota dan Daerah*. Penerbit ITB. Bandung. 1994.

Wiyono. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Dalam Rangka Otonomi Daerah*. [HTTP://www.arupa.or.id/papers/32.htm](http://www.arupa.or.id/papers/32.htm).